



# Jurnal Civic Education:

## Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

### Pendidikan (Politik) Pancasila di Indonesia: Tinjauan Kritis Fenomenologi Politik Pendidikan

Hastangka<sup>a1</sup>, Danang Prasetyo<sup>b2\*</sup>

<sup>a</sup> Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

<sup>b</sup> MKWU PPKn, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

<sup>1</sup> [hastangka@brin.go.id](mailto:hastangka@brin.go.id), <sup>2</sup> [danangprasetyo@stipram.ac.id](mailto:danangprasetyo@stipram.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

---

#### Informasi artikel

Sejarah artikel:  
Diterima : 18-04-2022  
Revisi : 20-05-2022  
Dipublikasikan : 14-06-2022

#### Kata kunci:

*Pendidikan politik  
Pancasila  
Pilar  
MPR RI*

---

#### ABSTRAK

Fenomena Pendidikan politik di Indonesia sejak paska reformasi menarik untuk diteliti. Pendidikan politik sebagai upaya untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara perlu ditinjau ulang dari aspek materi, penyelenggaraan, dan model Pendidikan politik yang diterapkan. Isu yang menjadi perhatian penting terkait Pendidikan politik di Indonesia menyangkut program Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh MPR RI dengan nama 4 Pilar MPR RI sebagai program sosialisasi yang dilakukan oleh MPR RI terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Program ini menjadi polemik dan persoalan di masyarakat. Fenomena Pendidikan politik ini berpengaruh pada konsepsi, persepsi, dan cara pandang masyarakat dalam melihat realitas sosial dan politik yang berkembang. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena Pendidikan politik Pancasila yang berkembang sejak paska reformasi terkait pemahaman dan konstruksi 4 Pilar MPR RI dalam wacana Pendidikan Pancasila. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, opini pada artikel Koran, dan dokumen negara dalam bentuk peraturan perundang undangan. Metode analisis yang digunakan menggunakan analisis fenomenologi politik pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi dan karakter arah dan orientasi Pendidikan politik Pancasila di Indonesia dalam mengkonstruksikan ide ide politik berbangsa dan bernegara belum sesuai dengan arah dan jalur yang tepat dan sesuai dengan pedoman umum dalam kehidupan bernegara, sehingga penyimpangan dalam penggunaan istilah terjadi sebagaimana kasus penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI.

---

#### Keywords:

*Political education  
Pancasila  
Pillar  
MPR RI*

---

#### ABSTRACT

**Pancasila Education (Politics) in Indonesia: A Critical Review of Educational Political Phenomenology.** The phenomenon of political education in Indonesia since the post-reform era is an interesting discourse. The implementation of political education to raise the awareness of living the appropriate life in society and the country to be reviewed in terms of the material aspect, the implementation and the applied model of political education. The issue that requires a lot of concern regarding political education in Indonesia includes the program run by the People's Consultative Assembly of Indonesia (MPR RI). The program covers 4 pillars which are Pancasila, the 1945 Constitution

(UD 1945), Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika. The program sparks controversy in the society. It affects people's conception, perception and perspective in understanding the social and political reality that's growing. The objective of this research is to analyze and describe the Pancasila political education phenomenon that has grown since the post-reform era. It's regarding the understanding of MPR RI's 4 pillars in the discourse of Pancasila Education. The method used in this research is a qualitative approach. Meanwhile the data is obtained from books, scientific articles, news articles, and the state's official documents such as legal law. The analysis method used is the analysis of political education phenomenology. The result of this research shows that the typology, characteristics and the orientation of Pancasila political education in Indonesia has not helped to construct ideas on political life in the society and the country. It is not yet in accordance with the general guidance of living in the society and the country. Deviations in the use of terms occur as in the case of the use of the term 4 Pillars of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI).

---

*Copyright © 2022 (Hastangka & Danang Prasetyo). All Right Reserve*

## **Pendahuluan**

Fenomena Pendidikan politik yang berkembang di Indonesia menarik perhatian bagi kalangan akademisi. Fenomena Pendidikan politik terjadi karena situasi dan kondisi dalam politik pemerintahan, politik kewargaaan, dan perilaku elit politik yang dilakukan dalam melakukan interaksi, *lobby* politik, dan komunikasi politik. Fenomena Pendidikan politik menjadi kajian penting dalam studi ilmu politik secara khusus politik Pendidikan sebagai obyek material. Dalam studi yang lain seperti pendekatan psikologi dalam membaca fenomena pendidikan politik secara khusus perilaku dan karakter politisi dalam melakukan tindakan politik menjadi satu disiplin ilmu yang disebut psikologi politik. Studi ini memfokuskan pada gejala politik yang muncul dan berkembang di masyarakat dan negara. Dalam studi ilmu politik pendekatan yang dilakukan untuk melihat fenomena politik menggunakan 3 analisis utama antara lain: 1. analisis sistem, yang membahas tentang sistem politik dan pemerintah. 2. analisis perilaku, yang membahas dan mengkaji tentang perilaku politik, 3. analisis filsafat politik, yang memfokuskan pada hakikat politik seperti kekuasaan, moral politik, dan tujuan tujuan politik (Yustisia et al., 2021). Kerangka ini yang selalu menjadi titik pijak dalam studi ilmu politik.

Berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik merupakan bagian dari tema pembahasan yang selalu aktual. Tema-tema yang dibahas berkaitan dengan isu pemilu, nasionalisme, identitas nasional, demokrasi, dan HAM (Hak Asasi Manusia). Pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada bagaimana membina warga negara untuk menumbuhkan jiwa bela negara dan meningkatkan kesadaran dan rasa cinta tanah air (Nurdiansyah & Dewi, 2021). Topik pembahasan dalam kajian ini juga akan memfokuskan tentang fenomena politik yang berkembang di Indonesia terutama sejak paska reformasi. Fenomena politik yang berkembang diseleksi sampai pada objek material yang ditemukan tentang isu polemik 4 Pilar MPR RI. Polemik 4 Pilar MPR RI ini menjadi menarik perhatian dalam studi ini karena dalam studi sebelumnya menunjukkan bahwa 4 Pilar MPR RI diterima sebagai kebenaran dan keyakinan faktual oleh sebagian masyarakat karena sumber pengetahuan untuk Pendidikan politik bagi masyarakat yang berasal dari negara atau kekuasaan. Adapun 4 Pilar MPR RI yang dirumuskan oleh MPR RI terdiri atas:

Tabel.1 Konstruksi 4 Pilar MPR RI

1	<b>Pancasila</b>
2	UD 1945
3	Negara Kesatuan Republik Indonesia
4	Bhinneka Tunggal Ika

Sumber: (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2020).

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan konstruksi Pendidikan politik yang dirumuskan oleh MPR RI mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai varian 4 Pilar MPR RI. MPR RI juga menerbitkan buku 4 Pilar MPR RI sebagai berikut ini.



Gambar 1. Buku Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

Sumber: (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2020).

Buku di atas merupakan terbitan dari MPR RI untuk menegaskan konsep MPR RI bahwa 4 pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari pilar MPR RI. Buku yang diterbitkan oleh MPR RI ini telah disosialisasikan sebagai bahan Pendidikan politik sejak tahun 2019 dengan versi perbaikan yang dulu berjudul 4 Pilar berbangsa dan bernegara. Fenomena pendidikan politik tentang konstruksi ide ide berbangsa dan bernegara mulai mengalami pergeseran tafsir atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dalam aspek sejarah, yuridis formal, dan Pendidikan merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hal ini lokus mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, masyarakat mengenal dan memahami Pancasila sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang terdiri atas 5 sila yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini menjadi bagian penting dalam mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah nilai dan dasar bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

Konsepsi Pancasila sebagai dasar negara telah diketahui dan dikenal dalam sejarah perumusan Pancasila. Terdapat berbagai macam kajian dan penelitian yang menelusuri tentang sejarah Pancasila baik secara teks maupun tokoh tokoh yang berperan penting dalam pembentukan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks sejarah, sejak Indonesia akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang, para pendiri bangsa mulai merancang bangunan negara Indonesia merdeka dengan menggunakan suatu dasar tertentu. Proses perumusan dasar

negara ini telah melahirkan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam pembentukan negara bangsa untuk itu Pancasila selalu menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia termasuk dalam bernegara.

Posisi Pancasila menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Posisi penting ini telah membawa Pancasila menjadi bagian dari salah satu mata kuliah atau mata pelajaran mendasar pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pada tingkat Perguruan Tinggi, Pancasila telah dimasukkan menjadi kurikulum wajib dan tercantum dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Fakta historis dan yuridis, Pancasila telah didesain dan dirumuskan menjadi dasar negara. Proses internalisasi secara sistematis dimulai dari Tubapi (Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi) pada periode kepemimpinan Soekarno. Materi Tubapi antara lain: pertama, lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Kedua, Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Ketiga, manifesto politik beserta perinciannya dari DPA. Keempat, pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang terkenal dengan nama "Djarek" beserta perinciannya dari DPA. Kelima, pidato Presiden di depan sidang umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA. Keenam, penjelasan manipol dan usdek, rangkaian pidato radio, Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, H. Roeslan Abdulgani. Ketujuh, amanat pembangunan Presiden pada sidang Depenas tanggal 28 Agustus 1959 beserta ringkasan pembangunan semesta (perpusbungkarno, 2022).

Pada perkembangan berikutnya, Pancasila kemudian menjadi proses pendidikan yang sistematis dan terstruktur di dalam kurikulum pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sejak Pancasila menjadi program negara yang dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Program ini mulai diperkenalkan pada masa pemerintah Soeharto melalui Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Pada tingkat pendidikan Pancasila diperkenalkan dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sampai pada periode tahun 1995. Ketika pergantian kekuasaan dari Soeharto kepada era reformasi, materi Pancasila mulai dihilangkan dan diganti dengan menjadi kewarganegaraan. Untuk sebagian besar, Pancasila mulai dianggap tabu dan milik rezim orde baru. Maka pada awal reformasi tidak banyak orang berbicara tentang Pancasila karena dianggap dari warisan penguasa yang otoriter.

Memori dan imajinasi masyarakat tentang Pancasila untuk generasi pada era Soeharto masih merasakan dan memiliki peran penting Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berbagai program untuk memberikan wawasan Pancasila kepada masyarakat dan penyelenggara negara dirumuskan dan disusun secara sistematis dengan lembaga yang terpusat di Jakarta disebut BP 7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Badan ini menjadi badan pelaksana dan perumus serta penyusun program program untuk meletakkan dasar pengetahuan tentang Pancasila secara terpusat. Namun keberadaan lembaga ini kandas pada era reformasi. Lembaga ini dibubarkan pada era reformasi melalui Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Paska reformasi telah membawa dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami disorientasi tujuan dan arah. Titik tolak dinamika dan disorientasi tujuan dan arah ini nampak sejak paska reformasi berbagai perubahan pada aspek politik, hukum, dan sosial sangat dramatis. Bentuk perubahan politik, dinamika politik nasional dan lokal telah melahirkan sistem politik yang berkembang dengan model multi partai, demokrasi multi partai, demokrasi pemilihan langsung, dan dinamika politik pemerintah membawa arus perluasan otonomi daerah

yang berdampak muncul berbagai kondisi pemekaran daerah dan wilayah secara massif, perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali, dan munculnya lembaga lembaga baru negara karena lembaga lama dianggap tidak produktif dan efektif dalam proses proses penegakkan hukum dan menjamin layanan publik.

Konteks ini yang akan membawa dampak pada posisi lembaga MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Problem posisi kelembagaan ini berpengaruh pada kewenangan, peran dan fungsi MPR RI menjadi setara dengan lembaga tinggi lainnya. Negara kehilangan fungsi *check and balances* sejak paska reformasi.

Situasi dan kondisi ini yang akan menjadi titik tolak pembahasan Pancasila adalah dasar negara bukan pilar. MPR RI (terdiri dari DPR dan DPD) menjadi pusat perhatian dalam kajian ini karena MPR RI merupakan salah satu lembaga pelaksana sosialisasi 4 pilar, dan anggota DPR banyak yang melakukan kegiatan ini (Sahroni, 2019) (Rataba, 2020) (Istiqomah, 2022). MPR yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal idelogi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI. Terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika (Herdian & Simanjuntak, 2021). Selain itu terdapat beberapa kegiatan serupa, salah satu kegiatan Pendidikan politik yang dilakukan oleh MPR RI melalui sosialisasi 4 Pilarnya.



Gambar 2. Sosialisasi 4 Pilar MPR RI  
Sumber: (Larasati & Cahyana, 2021).

Gambar 2 di atas menunjukkan program pendidikan politik yang dilakukan oleh MPR RI pada hari Kamis, 11 November 2021. Dari sinilah awal persoalan pokok pilarisasi atas dasar negara yaitu Pancasila. Pilarisasi terhadap konsepsi kebangsaan yang lainnya seperti UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang fenomena Pendidikan politik atas pilarisasi Pancasila yang dilakukan oleh MPR RI menjadi salah satu bentuk dekonstruksi atas makna bahasa dan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dekonstruksi ini terjadi karena aspek Pendidikan politik yang harus untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara secara politik, kemudian bergeser dengan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga negara secara khusus MPR RI berpotensi melakukan pengabaian politik (*politics of ignorance*) bagi masyarakat untuk bisa memahami akan nilai dan makna

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang baik dan benar. Pada dasarnya Pendidikan politik diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat menyangkut masalah-masalah kenegaraan (Purnawati, 2019).

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif (Sarifudin et al., 2020) dengan mengadopsi menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian kebahasaan (Nugrahani, 2014). Bahasa memiliki aspek penting dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi dan fakta yang ada di masyarakat. Bahasa sebagai salah satu media atau alat komunikasi memiliki peran penting dalam proses internalisasi nilai dan pengetahuan kepada seseorang. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari data faktual dan tekstual berasal dari penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, buku sosialisasi dan majalah MPR RI, peraturan perundang undangan terkait, berita media *online* (Yaniawati, 2020). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi politik pendidikan melalui analisis koherensi, korespondensi, dan analisis induktif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Fenomenologi Pendidikan Politik 4 Pilar MPR RI**

Istilah fenomenologi mulai diperkenalkan pada periode tahun 1960an sampai dengan 1970an dalam kelompok studi politik amerika. Konsepsi fenomenologi ini membangun kesadaran politik baru dalam studi ilmu politik. Hal ini berkaitan dengan opini politik (*political opinion*) dan pengetahuan politik (*political knowledge*). Fenomena politik ini menjadi perhatian penting di kalangan akademisi untuk melihat dinamika dan perkembangan politik (Jung, 1982). Dalam studi lain, semua pidato ialah politik, pidato politik dalam kampanye politik menjadi wacana penting. Hubungan kekuasaan dan otoritas, dan bahasa politik menjadi bagian penting dalam wacana fenomenologi politik (Brown, 1983). Pidato Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia pada sidang Tahunan MPR RI, isi dari pidato Presiden salah satunya mengapresiasi MPR RI dalam program empat pilar yang menyebut MPR RI terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Kemenpora.go.id, 2021). Pidato politik presiden Jokowi ini justru telah memberikan legitimasi pada kegiatan MPR RI yang masih melakukan penggunaan 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pidato ini menjadi perdebatan di kalangan komunitas akademik yang menjadikan isu pidato presiden yang lebih memiliki kecenderungan pada kegiatan MPR RI yang sudah sejak lama menjadi polemik di masyarakat.

Gerakan masyarakat juga sudah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat dalam meluruskan penafsiran dan pemahaman 4 Pilar MPR RI yang bertentangan dengan sejarah bangsa Indonesia. Gerakan masyarakat yang dikoordinasi oleh K.R.A.P Eri Ratmanto dengan Komunitas Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar. Gerakan ini konsisten pada pendapat Mahkamah Konstitusi tahun 2014 bahwa upaya menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, akan menimbulkan kekacauan epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi (Arfana, 2014a); (Arfana, 2014b). Adapun beberapa aktivitasnya seperti gambar di bawah ini.



Gambar. 3 Kegiatan pelurusan pemahaman Pancasila bukan pilar oleh Komunitas Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar, di Indramayu, Jawa Barat, 19 Agustus 2021.

Sumber: (Ratmanto, 2021)

Kegiatan 4 Pilar MPR RI telah mendapatkan reaksi dari masyarakat terutama Komunitas Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar. Gerakan ini sebagai wujud dari upaya untuk pelurusan pemahaman Pancasila yang ditafsirkan menjadi pilar. Upaya untuk mengembalikan pengertian Pancasila dasar Negara bukan bagian dari 4 pilar karena MPR RI melalui program sosialisasi 4 pilar ini sudah berjalan beberapa tahun (Ratmanto, 2021). Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang telah sejak lama menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia dianggap berbeda oleh MPR RI karena melakukan kategori menjadi 4 pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun, MPR sendiri telah menegaskan bahwa empat pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Empat pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri (Putri & Nailufar, 2022). Namun, penggunaan istilah 4 pilar tetap saja tidak tepat apabila menempatkan Pancasila sama seperti pilar lain, karena istilah yang selalu digunakan adalah empat pilar. Mestinya putusan MK membatalkan frasa 'Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara' dijadikan pegangan, mestinya kegiatan sosialisasi Empat Pilar dapat diganti dengan penyerapan aspirasi rakyat dan pengkajian, tidak perlu sosialisasi lagi soal Empat Pilar, apalagi Pancasila itu bukan bagian dari Empat Pilar (Novia & Ilham, 2015). Istilah empat pilar telah mengacaukan dan mendelegitimasi tata hubungan hakikat dan makna istilah Pancasila (Grehenson, 2019). Karena itu, jikalau tetap ingin menggunakan istilah pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau pilar ke-Indonesiaan, maka pilar yang dimaksud hanya tinggal tersisa tiga, yaitu UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dari semua prinsip-prinsip pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (Asshiddiqie, 2020), Pancasila serangkaian nilai-nilai yang mendasar (Herlinaa & Dewi, 2021).

Gerakan ini melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membuat topi, mug, dan kaos. Proses Pendidikan politik tidak semata-mata dimaknai hanya sekedar menggabungkan antara politik dan pendidikan. Makna dari konsep pendidikan politik lebih luas dari hal itu. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa untuk membina kemampuan individu sebagai pribadi yang otonom dan sebagai proses pendidikan public (*public education*). Hal ini bertujuan untuk pelibatan warga masyarakat dalam isu isu publik (Sumanto & Haryanti, 2021). Konsep lain tentang pendidikan politik juga mendeskripsikan sebagai bentuk sosialisasi nilai nilai politik dalam menumbuhkan kesadaran politik dan partisipasi politik (Ilham et al., 2020). Oleh karena itu materi pokok dapat kajian Pendidikan

politik ialah fenomena politik yang ada dan terjadi di sekitar masyarakat. Bentuk fenomena politik dapat berupa narasi politik, kejadian politik, dan fakta politik yang terjadi.

Berdasarkan dari fenomena politik yang berkembang di Indonesia sejak paska reformasi di atas melalui studi kasus dua paradigma dan model Pendidikan politik yang dikembangkan oleh lembaga negara (MPR RI) dan masyarakat menimbulkan perbedaan pemahaman yang mendasar. Fenomena ini menjadi kajian penting untuk melihat aspek filsafat Pendidikan politik di Indonesia. Istikharah dan Asrinaldi memberikan definisi tentang Pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki unsur mendasar yaitu: pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogis yang dilakukan secara suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara (Istikharah & Asrinaldi, 2019). Dengan adanya pengetahuan politik yang memadai melalui Pendidikan politik yang baik, masyarakat akan mendapatkan manfaat untuk bisa lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan warga negara (E. Nurdiansyah, 2015).

### **Apolitik atas Pendidikan (Politik) Pancasila**

Dampak sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan mengategorikan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar telah merugikan proses pengajaran dan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (Hastangka et al., 2019). Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh MPR RI melalui sosialisasi 4 Pilar MPR RI menjadi proses reduksi pemahaman atas Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara massif dan sistematis. Tujuan utama Pendidikan politik untuk membangun kesadaran politis pentingnya kehidupan kebangsaan. Dengan penggunaan istilah untuk menyebut Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar untuk dipopulerkan dan diperkenalkan ke dalam Pendidikan politik. Di dunia teknik secara khusus ilmu arsitektur dan bangunan, istilah pilar merujuk pada tiang bangunan tertentu. Pilar berarti tiang penyangga pada bangunan. Namun istilah ini mulai muncul dan digunakan untuk menyebut program sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Program ini menyebut Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari pilar. Penggunaan pilar ini menjadi problem yuridis, pendidikan, historis, filsafat, dan bahasa. Istilah ini kemudian dianggap tidak lazim karena menyebut suatu fakta sejarah dan yuridis tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak dapat diartikan sebagai pilar.

Posisi Pancasila tidak pernah dikenal dalam sejarah pendidikan politik dan hukum di Indonesia sebagai bagian dari pilar atau istilah pilar. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia merupakan dasar Negara. Penggunaan pilar yang dilakukan oleh MPR RI sebagai salah satu wujud dekonstruksi makna dan kedudukan Pancasila. Dalam epistemik yang akan terjadi ialah *pertama*, akan terjadi dualisme pemahaman di masyarakat tentang pengertian dan makna Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dualisme pemahaman ini akan berpotensi pada proses keaburan atas makna dan hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pelaksanaannya. *Kedua*, terjadi manipulasi pengetahuan yang benar tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga proses transformasi dan pencerdasan generasi muda untuk memaknai Pancasila tidak dapat berjalan secara baik. *Ketiga*, hilangnya memori kolektif bersama tentang ajaran-ajaran Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang benar bagi generasi yang mendapatkan materi dan ajaran 4 Pilar MPR RI. Generasi ke depan akan memahami dan ingat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pilar. Model pendidikan politik yang diselenggarakan oleh MPR RI dapat berpotensi menyebabkan ketidapedulian politik (apolitik) bagi masyarakat dan generasi muda karena materi dan jargon yang berpotensi membingungkan generasi muda tentang hakikat dan makna Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika. Model ini lebih menekankan pada hasrat politik daripada Pendidikan politik yang baik.

### **Pilarisasi Pancasila: Absurditas Pendidikan Politik**

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dalam aspek historis, yuridis, dan filosofis tentu saja tidak dapat tergantikan dengan kata pilar atau menjadi salah satu judul program kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI sebagai 4 Pilar MPR RI. MPR RI sebagai lembaga negara tentu saja tidak dapat mengklaim Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar milik MPR RI. Upaya untuk melakukan legitimasi atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar MPR RI akan berdampak pada reposisi peran Pancasila sebagai dasar menjadi pilar. Dampak ini akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat dan generasi muda dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Akhir akhir ini, generasi muda tidak sadar bahwa istilah 4 pilar itu merupakan istilah yang bermasalah dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara karena penggunaan 4 pilar untuk Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan peran dan fungsi satu dengan yang lainnya.

MPR RI menjadi lembaga yang bertanggung atas absurditas Pendidikan politik ini karena pola penggunaan istilah yang tidak lazim telah berdampak pada manipulasi pengetahuan tentang sejarah bangsa. Arti penting Pancasila kemudian bergeser menjadi pilar. Untuk itu, reposisi ini menjadi persoalan yang mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara jika tidak diluruskan.

Wacana tentang Pancasila sejak pasca reformasi menarik untuk diikuti. Pancasila pada masa pasca reformasi mengalami berbagai macam tantangan. Pancasila sejak pasca reformasi mulai dilupakan oleh penyelenggara negara dan para aktivis reformasi karena Pancasila dianggap tidak terlalu penting dan fundamental untuk era modern dan demokratis. Pancasila mulai dihilangkan perannya dalam sistem nilai dan pendidikan. Pada aspek pendidikan Pancasila mulai tidak lagi diajarkan di sekolah baik ditingkat dasar maupun perguruan tinggi dalam beberapa tahun. Kemudian berbagai macam gejolak sosial dan politik berkembang, problem mendasar ialah demokrasi dan HAM tidak berakar pada jati diri bangsa. Berbagai tuntutan reformasi tidak hanya ingin menurunkan Soeharto dan mengganti sistem yang telah dibuat Soeharto tetapi juga mengganti seluruh sistem yang ada di Indonesia sampai pada jati diri bangsanya. Kondisi ini telah melahirkan berbagai macam persoalan sosial, politik, hukum, moral, ekonomi, dan budaya. Indonesia kehilangan jati dirinya.

Pancasila kemudian disuarakan kembali melalui berbagai cara untuk kembali kepada Pancasila karena masyarakat dianggap sudah jauh dari nilai nilai Pancasila. Sejak reformasi mulai bergulir pada tahun 1999, berbagai gejolak sosial dan politik semakin berkembang sampai ke daerah daerah. Orientasi hidup berbangsa dan bernegara semakin kabur bangsa ini akan dibawa kemana. hingga hampir 1 dekade, gerakan untuk kembali kepada Pancasila semakin menguat dalam bentuk nilai nilai kebangsaan semakin menjadi kesadaran. Pada saat itu pada periode akhir tahun 2009, muncul program kegiatan 4 pilar yang dipopulerkan menjadi program MPR RI sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Wacana Pancasila mulai berkembang ketika Pancasila semakin dipopulerkan menjadi pilar muncul ketidaksepahaman di masyarakat dan politisi MPR RI bahwa upaya untuk mengubah Pancasila dari dasar menjadi pilar semakin nyata dengan agenda program yang dibawa oleh MPR RI. Wacana tentang Pancasila kemudian menjadi proses politis. Program 4 pilar mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga muncul demonstrasi menolak 4 pilar sampai berujung pada uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU\_XI/2013, kegiatan ini tidak berhenti tetapi berubah nama menjadi sosialisasi 4 pilar MPR RI. Pancasila semakin dikanalisisasi menjadi salah satu pilarnya MPR RI.

Pendidikan politik yang seharusnya untuk membangun cara berpikir dan pola berpikir masyarakat dan generasi muda agar bisa memiliki kesadaran kritis dan mendalam tentang arti berbangsa dan bernegara akan runtuh dan “rusak” ketika nalar yang dibangun untuk meletakkan fondasi pendidikan politik Pancasila kurang memadai dan kurang mendalam. Dalam konteks kajian ini menunjukkan bahwa akar penguatan pendidikan politik dapat berjalan dengan baik secara khusus melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan generasi muda untuk mengantisipasi paham-paham ideologis lain. Harus ditekankan bahwa Pancasila menjadi warisan terbaik bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dijaga dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia (Fauzan et al., 2021).

### Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan tentang Pendidikan politik Pancasila dalam perspektif fenomenologi politik Pendidikan menunjukkan bahwa isu penting dalam Pendidikan politik Pancasila yang berkembang hari ini ialah tidak hanya persoalan pengajaran dan arah Pendidikan Pancasila tetapi memfokuskan pemahaman Pancasila yang menyimpang dalam Pendidikan politik pada model sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu MPR RI. Pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga negara telah berdampak pada dekonstruksi makna Pancasila sebagai dasar negara. Pada dasarnya Pancasila tidak tepat disebut bagian dari 4 pilar MPR RI atau bagian dari pilar-pilar yang lain. Esensi dari Pendidikan politik ialah untuk memberikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara dan pengetahuan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dengan konstruksi yang dirumuskan oleh lembaga negara telah membawa konsepsi Pendidikan politik Pancasila ke arah jauh dari harapan untuk membentuk pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Dekonstruksi atas Pancasila dari dasar menjadi pilar merupakan salah satu bentuk dekonstruksi pada Pendidikan politik Pancasila yang tidak lazim dan berdampak secara yuridis, politis, historis, filosofis, sosiologis, dan psikologis dalam Pendidikan Pancasila di Indonesia.

### Referensi

- Arfana, N. T. (2014a). *MK: Bukan “Empat Pilar”, Pancasila Memiliki Kedudukan Tersendiri*. Mkri.Id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9794>
- Arfana, N. T. (2014b). *Pancasila Bukan sebagai Pilar Dipaparkan Ahli Pemohon Uji UU Parpol*. Mkri.Id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9685>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa*. Jimly.Com. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/184/PANCASILA\\_DAN\\_4\\_PILAR\\_BARU.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/184/PANCASILA_DAN_4_PILAR_BARU.pdf)
- Brown, R. H. (1983). Theories of Rhetoric and the Rhetorics of Theory: Toward a Political Phenomenology of Sociological Truth. *Social Research, SPRING, 50*(1), 126–157. <https://www.jstor.org/stable/40958871> REFERENCES
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2021). Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4*(2), 43–51. <https://doi.org/10.36412/ce.v4i2.2373>
- Grehenson, G. (2019). *Sosialisasi Empat Pilar MPRRI Dinilai Mengacaukan Pemahaman Hakikat dan Makna Pancasila*. Ugm.Ac.Id. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/17606-sosialisasi-empat-pilar-mpr-ri-dinilai-mengacaukan-pemahaman-hakikat-dan-makna-pancasila>
- Hastangka, H., Armawi, A., & Kaelan, K. (2019). Dampak sosialisasi empat pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. *Jurnal Civics: Media Kajian*

- Kewarganegaraan*, 16(2), 98–110. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.21908>
- Herdian, L., & Simanjuntak, P. (2021). *Sosialisasi Empat Pilar MPR Merupakan Vaksinasi Ideologi Pancasila Kepada Masyarakat*. Pontas.Id. <https://pontas.id/2021/08/18/sosialisasi-empat-pilar-mpr-merupakan-vaksinasi-ideologi-pancasila-kepada-masyarakat/>
- Herlinaa, L., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Di Era Globalisasi Lin. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 70–78.
- Ilham, F., Hasrul, & Dewi, S. F. (2020). Model Pendidikan Politik Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang The Political Education Model of the Padang Branch Islamic Student Association. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 104–112.
- Istikharah, I., & Asrinaldi, A. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>
- Istiqomah, D. (2022). *Anggota MPR RI Ini Jelaskan Pentingnya 4 Pilar Kebangsaan*. Mediaindonesia.Com.
- Jung, H. Y. (1982). Phenomenology as a critique of politics. *Human Studies*, 5(1), 161–181. <https://doi.org/10.1007/BF02127675>
- Kemempora.go.id. (2021). *Berikut Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo Dalam Sidang Tahunan MPR 2021*. <https://www.kemempora.go.id/detail/847/berikut-naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-sidang-tahunan-mpr-2021>
- Larasati, & Cahyana, I. N. (2021). *Seminar Nasional “Peran Empat Pilar MPR RI dan Kesadaran Bela Negara dalam Upaya Mendukung Pemerintah Menangani Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.”* Trisakti.Ac.Id. <https://trisakti.ac.id/news/seminar-nasional-peran-empat-pilar-mpr-ri-dan-kesadaran-bela-negara-dalam-upaya-mendukung-pemerintah-menangani-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Novia, D. R. M., & Ilham. (2015). *Jimly Sebut Pancasila Bukan Bagian dari Pilar Bangsa*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/noe49v/jimly-sebut-pancasila-bukan-bagian-dari-pilar-bangsa>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia Edwin. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(implementasi pendidikan politik), 54–58.
- Nurdiansyah, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(02), 105–115.
- perpusbungkarno. (2022). *Tudjuh bahan-bahan pokok indoktrinasi/ Panitia Pembina Djiwa Revolusi/Panitia Retooling Aparatur Negara*. <https://perpusbungkarno.perpusnas.go.id/web/index.php/koleksi/koleksi-khusus/468-tudjuh-bahan-bahan-pokok-indoktrinasi>
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. (2020). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Kesepuluh). Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Purnawati, L. (2019). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat ( Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung ). *Jurnal Publiciana*, 11(1), 55–71.
- Putri, A. S., & Nailufar, N. N. (2022). *4 Pilar Kebangsaan: Pengertian dan Tujuannya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/070000569/4-pilar-kebangsaan-pengertian-dan-tujuannya?page=all>

- Rataba, E. S. (2020). *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI 11 Februari 2020*. Dpr.Go.Id. <https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1874/berita/1978>
- Ratmanto, K. E. (2021). Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar (Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar). *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 43–50. <https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4457>
- Sahroni, A. (2019). (*Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika*) Dalam Masa *Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020*. Dpr.Go.Id. <https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1392/berita/2242>
- Sarifudin, Evendi, H. H., Jumasa, M. A., Surjono, H. D., Hasana, S. N., Maharany, E. R., Setiawan, A., Wigati, S., Sulistyaningsih, D., Putri, N. W., Dwijayanti, R., Wisudawati, W., Sulistyowati, E., Rusli, M., Hermawan, D., Supuwingsih, N., Simarmata, J., Mujiarto, Agung, A. A. G., ... Samatowa, U. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. In *JPM : Jurnal Pendidikan Matematika*.
- Sumanto, & Haryanti. (2021). *Pendidikan Politik*. Unpam Press.
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, April, 15.
- Yustisia, W., Abdul, H. M., & Rahkman., A. (2021). *Psikologi Politik*. Kompas Gramedia.